

PERAN DINAS PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI I TANAH GROGOT KABUPATEN PASER

Agus Zulrahman¹

Abstrak

Artikel ini membahas tentang untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sekolah Menengah Atas Negeri I Tanah Grogot Kabupaten Paser, dan sekaligus untuk mengetahui kendala atau hambatan (kelemahan) yang dihadapi Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan program – program Peningkatan Kualitas Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri I Tanah Grogot Kabupaten Paser. Adapun indikator yang menjadi fokus penelitian peran Dinas Pendidikan dalam peningkatan kualitas pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri I Tanah Grogot Kabupaten Paser adalah peningkatan Sumber Daya Manusia Guru, Penyediaan Sarana dan Prasarana, dan Kurikulum. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Metode Library Research, Field Work Research, Observasi, Dokumentasi dan Wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan telah melaksanakan perannya melalui program – program peningkatan kualitas tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan sarana pendidikan, serta penyampaian dan pengembangan kurikulum.

Kata Kunci: Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Paser

Pendahuluan

Pembangunan nasional meliputi seluruh bidang kehidupan yaitu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pembangunan di bidang lainnya. Keberhasilan dalam pembangunan ditentukan terutama oleh kualitas sumber daya manusia, baik yang mengambil keputusan, penentu kebijakan maupun pelaksana di sektor terdepan. Hal ini menunjukkan bahwa unsur manusia menjadi penggerak dalam roda pembangunan.

Bebicara mengenai kualitas sumber daya manusia sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Dalam Undang – Undang No 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: aguszulrahman@gmail.com

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Ada banyak faktor pendukung untuk keberhasilan suatu proses pendidikan. Misalnya Kurikulum yang solid, tenaga pendidik yang profesional, sarana pendidikan yang lengkap, suasana belajar yang tenang, tingkat inteligensi siswa yang diatas rata-rata dan lain-lain. Namun demikian, proses pendidikan tetap berlangsung hingga saat ini meskipun tidak selalu didukung oleh faktor-faktor pendukung tersebut. Sehingga produk sumber daya manusia yang dikeluarkan menjadi lulusan yang tidak memiliki keterampilan khusus yang bisa diandalkan untuk menopang kehidupannya di masa yang akan datang. Secara garis besar pendidikan di Indonesia, umumnya pola pendidikan masih mengacu pada kuantitas peserta didik, belum memikirkan kualitas. Sehingga proses pendidikan berjalan tidak maksimal sebagaimana yang diharapkan. Cenderung peserta didik hanya menghabiskan waktu datang kesekolah dan pulang tanpa memiliki bekal ilmu yang secara pasti bisa di aplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang lebih parah lagi di daerah-daerah terpencil dan jauh dari jangkauan pembangunan. Kesemua faktor pendukung itu kadang-kadang tidak dimiliki sama sekali.

Berbicara tentang peningkatan mutu pendidikan, maka diperlukan sebuah komitmen, baik oleh pemerintah, pihak sekolah, dan masyarakat. Karena itu, kalau kita ingin bangsa ini maju maka mulai saat ini pola pikir kita tentang paradig pendidikan meski diubah. Sebagai bahan perbandingan, anggaran dana untuk bidang lain, misalnya bidang ekonomi dan pembangunan infrastruktur, maka akan tampak bahwa anggarannya bisa dua kali lipat dari anggaran pendidikan.

Hal tersebut menggambarkan bahwa pembangunan fisik masih menjadi primadona bagi pemerintah baik pusat maupun daerah. Artinya juga bahwa, pembangunan mental belum menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Padahal kalau kita ingin bercermin dengan beberapa negara di Asia yang notabene miskin dari sisi sumberdaya alam (SDA) tapi kaya dari segi sumberdaya manusia (SDA) seperti Korea, maka sepatutnyalah mulai sekarang kita memikirkan pembangunan SDM yang bermutu dan berkualitas sehingga dapat mengangkat derajat bangsa di mata dunia.

Sejalan dengan otonomi daerah yang juga berbarengan dengan adanya otonomi pendidikan, maka seharusnya pemerintah kabupaten lebih cerdas memikirkan lebih jauh tentang kondisi pendidikan di daerahnya masing-masing dengan tetap mengacu pada program pendidikan nasional seperti standar nilai, kurikulum dan sebagainya. Memikirkan di sini maksudnya di samping meningkatkan anggaran pendidikan minimal 20 % –seperti yang telah diisyaratkan dalam Undang-Undang. juga memikirkan langkah-langkah apa yang strategis untuk dijalankan agar pendidikan di daerahnya dapat maju.

Hal tersebut harus dilakukan karena kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi kualitas-kualitas dari pembangunan di suatu daerah. Dan upaya

paling strategis bagi peningkatan sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi Negara dan bangsa Indonesia. Sebab, dengan pendidikan kita dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan akan berarti dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia bilamana pendidikan tersebut memiliki sistem yang berkualitas dan relevan dalam pembangunan. Oleh karena itu kualitas pendidikan merupakan kebijakan dan program yang harus dilaksanakan secara optimal (Depdiknas, 2001:1).

Sekolah berperan besar dalam pengembangan berbagai aspek dari anak didik, apa lagi dengan kondisi yang seperti sekarang, yaitu untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia, tentu saja sekolah menjadi ujung tombak dan mempunyai peran yang sangat strategis. Melalui bidang pengajaran, sekolah membantu anak didik mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan kerja, sehingga anak didik memiliki keahlian untuk bekerja dan ikut membangun bangsa dan Negara.

Pendidikan yang diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau Pendidikan tinggi dikenal sebagai Pendidikan Menengah.

SMA 1 Negeri Tanah Grogot merupakan salah satu sekolah umum (SMA) yang berstatus negeri yang ada di Kecamatan Tanah Grogot dari 7 SMA Negeri yang ada di Kabupaten Paser. SMA 1 merupakan SMA tertua yang ada di Kabupaten Paser yang telah menghasilkan ribuan lulusan dari berbagai jurusan.

Seiring dengan perkembangan waktu dan tuntutan perkembangan pengetahuan, SMA Negeri 1 Tanah Grogot berkembang menjadi semakin baik dan mengalami kemajuan, baik dilihat dari aspek sarana, SDM Pendidik dan Tenaga Kependidikan, maupun aspek mutu lulusan. Bahkan, sejak tahun 2009, SMA Negeri 1 Tanah Grogot menjadi sekolah yang berstatus RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional). Hal ini tentu menjadi sorotan dari berbagai pihak dan di sisi lain menjadi sebuah kebanggaan bagi SMA Negeri 1 itu sendiri karena terpilih sebagai sekolah tunggal yang menyandang gelar RSBI.

Status RSBI ternyata bukanlah puncak dari keberhasilan, melainkan awal dari tanggung jawab baru yang harus dipikul oleh satuan pendidikan ini. Sebagai sekolah yang dipercaya, satuan pendidikan ini dituntut untuk terus meningkatkan kualitasnya di berbagai aspek berdasarkan standar pendidikan yang berbeda dari sekolah – sekolah pada umumnya. Tanggung jawab seperti itu tidaklah mudah untuk dijalani, semakin besar tanggung jawab tentunya membutuhkan alat tempur yang besar dan memadai pula demi tercapainya cita – cita dan harapan.

Meskipun ternyata di sisi lain sekolah ini masih membutuhkan perhatian di berbagai aspek. Seperti halnya masih terdapat beberapa ruang kelas yang cukup memprihatinkan, jika hal semacam ini kurang diperhatikan bisa saja kedepannya akan merusak citra dari RSBI itu sendiri. Di sisi lain, terdapat sarana yang

terkesan kurang bahkan tidak layak pakai seperti ; masih terdapatnya alat peraga yang rusak, belum tersedianya ruang ganti khusus, bahkan masih terdapatnya tenaga pengajar yang konvensional.

Untuk mengatasi masalah yang ada, tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak, baik pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, masyarakat, maupun pihak sekolah itu sendiri. Dinas Pendidikan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah pada urusan pemerintahan di bidang pendidikan tentunya memegang peranan penting dalam hal menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Oleh sebab itu, pada penelitian ini dipandang perlu mengkaji lebih lanjut tentang “Peran Dinas Pendidikan Untuk Meningkatkan kualitas pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri I Tanah Grogot Kabupaten Paser”.

Kerangka Dasar Teori

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana otonomi daerah pada urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 6 Tahun 2011, Dinas Pendidikan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut : Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi: Penyusunan perencanaan program di bidang pendidikan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah. Penetapan kebijakan dibidang pendidikan. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan yang meliputi kebijakan, pembiayaan, kurikulum, prasarana dan sarana, pendidik dan tenaga kependidikan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan criteria yang ditetapkan pemerintah. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Peran Dinas Pendidikan

Pada umumnya peran dapat diartikan sesuatu yang menjadi bagian atau pemegang kedudukan yang utama dalam terjadinya sesuatu hal, kegiatan atau peristiwa dalam kehidupan kemasyarakatan berdasarkan norma atau peraturan tertentu.

Menurut Gibson Ivancevich dan Donnelly (2007:479), peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan dua system yang berbeda, biasanya organisasi dan beberapa dari bagian lingkungan.

Sedangkan menurut Soekanto (1984) peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.

Apabila dikaitkan, peran Dinas Pendidikan itu merupakan aspek dinamis dalam menjalankan tugas, hak, dan kewajiban sesuai dengan kedudukan sebagai bagian atau perangkat dari Pemerintah yang mengurus bidang pendidikan yang aktif dan berpartisipasi dalam memberikan sumbangan yang berguna dengan tujuan meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek kualitas dan aspek kuantitas. Aspek kualitas menyangkut mutu dari Sumber Daya manusia tersebut. Kualitas Sumber Daya Manusia ini juga menyangkut dua aspek yaitu, aspek Fisik (kualitas fisik) dan Aspek Non Fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan bekerja, berfikir, dan keterampilan-keterampilan lainnya. Sedangkan aspek kuantitas menyangkut jumlah Sumber Daya Manusia itu sendiri yang mana kurang penting kontribusinya dalam pembangunan disbanding dengan aspek kualitas, karena kuantitas tanpa kualitas Sumber Daya Manusia yang baik akan menjadi beban pembangunan.

Menurut Wiliam B. Werther dan Kuith Davis mengatakan bahwa Sumber Daya Manusia adalah orang-orang yang siap memiliki kemampuan dan sanggup untuk menyumbangkan hal-hal yang berguna demi tercapainya suatu tujuan organisasi, bukan hanya industry atau perusahaan tetapi juga organisasi di bidang politik, pemerintahan, hokum, social, pendidikan, budaya, lingkungan dsb.

Pengertian Pendidikan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (1991:232) Pendidikan berasal dari kata didik, Lalu kata ini mendapat awalan kata me sehingga menjadi mendidik artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntutan dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.

Menurut UU No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Dalam dunia pendidikan dikenal pula adanya otonomi pendidikan. Menurut Musaheri (2005:125) otonomi pendidikan adalah proses pendelegasian atau pelimpahan kekuasaan (wewenang) dari pimpinan atau atasan ke tingkat bawahan dalam organisasi. Melalui desentralisasi, segala keputusan yang dibuat dalam tubuh organisasi didelegasikan kepada tingkatan di bawahannya.

Sekolah

Sekolah adalah lembaga dengan organisasi yang tersusun rapi dan segala aktifitasnya direncanakan dengan sengaja yang disebut kurikulum.

Secara Terminologi, Kata sekolah berasal dari Bahasa Latin: skhole, scola, scolae atau skhola yang memiliki arti: waktu luang atau waktu senggang, dimana ketika itu sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di tengah-tengah kegiatan utama mereka, yaitu bermain dan menghabiskan waktu untuk menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang itu adalah mempelajari cara berhitung, cara membaca huruf dan mengenal tentang moral (budi pekerti) dan estetika (seni). Untuk mendampingi dalam kegiatan scola anak-anak didampingi oleh orang ahli dan mengerti tentang psikologi anak, sehingga memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada anak untuk menciptakan sendiri dunianya melalui berbagai pelajaran di atas.

Saat ini, kata sekolah berubah arti menjadi: merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah. Kepala sekolah dibantu oleh wakil kepala sekolah. Jumlah wakil kepala sekolah di setiap sekolah berbeda, tergantung dengan kebutuhannya. Bangunan sekolah disusun meninggi untuk memanfaatkan tanah yang tersedia dan dapat diisi dengan fasilitas yang lain. Ketersediaan sarana dalam suatu sekolah mempunyai peran penting dalam terlaksananya proses pendidikan.

Ukuran dan jenis sekolah bervariasi tergantung dari sumber daya dan tujuan penyelenggara pendidikan. Sebuah sekolah mungkin sangat sederhana di mana sebuah lokasi tempat bertemu seorang pengajar dan beberapa peserta didik, atau mungkin, sebuah kompleks bangunan besar dengan ratusan ruang dengan puluhan ribu tenaga kependidikan dan peserta didiknya. Berikut ini adalah sarana prasarana yang sering ditemui pada institusi yang ada di Indonesia, berdasarkan kegunaannya: ruang belajar, kantor, perpustakaan, halaman/lapangan, ruang lain.

Menurut Suwarno (2006 : 50) fungsi sekolah adalah sebagai berikut: Mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan. Kemudian fungsi spesialisasi, efisiensi, sosialisasi, konversi dan transmisi kultural, serta transisi dari rumah ke masyarakat.

Konsep Mutu atau Kualitas

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (1995 : 533) Kualitas artinya adalah tingkat baik buruknya sesuatu atau derajat atau taraf (mutu).

Menurut Prof. Dr. Sumarsono, Med (2004 :16) menjelaskan bahwa dalam manajemen modern setidaknya kita perlu mengenal apa yang disebut dengan trilogy manajemen mutu, yaitu :

Perencanaan Mutu (*Quality Planning*). Perencanaan mutu ini melakukan analisis terperinci tentang kondisi sekolah sebelum menyusun program sekolah. Analisis ini menggunakan analisis SWOT, yaitu Strength (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunity (peluang), dan threat (ancaman). Biasanya kekuatan

memberikan peluang dan kelemahan memberikan ancaman. Namun bagi seorang professional harus mampu menguba ancaman menjadi peluang.

Pengendalian Mutu secara terpadu (*Inegrated Quality Conrol*). Keterpaduan mewujudkan dalam berbagai bentuk yang serba satu, misalnya satu pedoman, satu arah, satu bahasa dalam gerak dan tindak serta satu tim kerja yang utuh. Keterpaduan ini merupakan suatu system yang tiap komponennya saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Mutu harus dikendalikan dan dijaga agar tidak menurun dan hal ini merupakan jaminan mutu.

Peningkatan Mutu Secara berkelanjutan (*Sustain-Able Quality Upgrading*). Sebuah perencanaan yang baik menuntut pengendalian yang baik dan ini akan meningkatkan mutu secara terus menerus. Mutu atau kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan (terukur) atau yang tersirat dalam pendidikan, yang mencakup mutu input, proses, dan output.

Dari trilogi mutu ini dapat disimpulkan bahwa mutu atau kualitas ini gambaran dan karakteristik sumber daya, baik itu Sumber Daya Manusia atau barang dan jasa yang memiliki kemampuan dan dalam pencapaian mutu tersebut dilakukan dengan berbagai tahap mulai dari perencanaan mutu, pengendalian mutu agar tidak menurun, dan yang terakhir meningkatkan mutu secara berkelanjutan, dengan harapan mutu dapat terus dibangkitkan terus menerus.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Peran Dinas Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sekolah Menengah Atas Negeri I Tanah Grogot Kabupaten Paser.

Hasil penelitian ini difokuskan kepada tiga hal yaitu : peningkatan sumberdaya manusia guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, dan penyampaian dan pengembangan kurikulum.

Peningkatan Sumber Daya Manusia Guru

kualitas pendidikan sangat erat kaitannya dengan kualitas tenaga pendidik dalam satuan pendidikan. Dalam perannya meningkatkan kualitas pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri I Tanah Grogot, Dinas Pendidikan mengadakan pelatihan – pelatihan yang ditujukan kepada tenaga pendidik demi terciptanya tenaga pendidik yang berkualitas yang nantinya tenaga pendidik mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas pula.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tanpa didukung sarana yang memadai, proses pendidikan tentunya akan mengurangi efektifitas pembelajaran bahkan hal terburuk yang bisa terjadi tanpa dukungan sarana yang tepat maupun memadai proses pendidikan akan tersendat bahkan bisa saja terhenti secara total. Seorang guru yang berkompeten tanpa

didukung oleh sarana dan prasarana yang baik tidak akan bisa mentransfer pengetahuan/ pembelajaran secara maksimal.

Adapun program yang telah dijalankan oleh dinas pendidikan sehubungan dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan adalah sebagai berikut : Pembangunan Gedung Sekolah, Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, Pengadaan perlengkapan sekolah seperti Pengadaan proyektor dan kelengkapannya.

Pengembangan Kurikulum

Secara konvensional terdapat kecenderungan bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan selalu dikaitkan dengan ketersediaan sarana dan prasana pendidikan yang memadai, serta kompetensi guru. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya betul. Ada komponen lain yang jarang disentuh yaitu kurikulum. Argumentasi yang dikemukakan pada tulisan ini adalah kurikulum merupakan instrumen strategis bagi upaya peningkatan mutu pendidikan

Kurikulum sebagai instrumen peningkatan mutu pendidikan terdiri dari tiga entitas yaitu tujuan, metode, dan isi. Peningkatan kompetensi guru dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan hanya akan memberikan makna bagi peserta didik jika diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam kurikulum. Pada konteks Sistem Pendidikan Nasional rumusan tersebut dirumuskan pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Pada Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab Ketentuan Umum SKL didefinisikan sebagai “kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan”.

Untuk menjamin agar SKL tersebut dapat dicapai maka kegiatan belajar mengajar tersebut dilengkapi dengan tujuh standar lainnya yaitu standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan. Keberadaan standar-standar ini telah dijamin oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 2.

Kurikulum sebagai bagian dari intervensi peningkatan mutu pendidikan, tentu tidak bisa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, SKL menjadi rujukan ketika Kurikulum diterapkan, termasuk tujuh standar nasional pendidikan lainnya. Demikian juga dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tetap menjadi bagian Kurikulum. Satuan pendidikan tetap mempunyai kewenangan untuk mengembangkan kurikulum sendiri yang sesuai dengan kondisi satuan pendidikan tersebut.

Adapun program/kebijakan secara garis besar yang telah disiapkan oleh dinas pendidikan sehubungan dengan kurikulum adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, bahan ajar, metode pembelajaran dan sistem penilaian yang berstandar nasional dan internasional bagi RSBI dan SBI.

2. Pengembangan kurikulum pendidikan yang memberikan muatan soft skill untuk peningkatan akhlak dan kepedulian terhadap lingkungan.

Beberapa program dan kegiatan Dinas Pendidikan dalam upaya pengembangan kurikulum adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan
2. Pelaksanaan Pengawasan Pendidikan
3. Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran
4. Pembinaan, Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba Sain Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional
5. Pembinaan, Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba Cerdas Cermat Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional
6. Penyusunan Kurikulum
7. Monitoring dan Evaluasi

Kurikulum merupakan pelajaran dan program pembelajaran yang berasal dari pusat yang kemudian melalui Dinas Pendidikan di daerah disampaikan kepada tiap – tiap satuan pendidikan. Bersama dengan pihak – pihak yang berwenang, Dinas Pendidikan mengembangkan kurikulum yang ada di satuan pendidikan yang kemudian disebut sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

Kurikulum nantinya akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman, dan akan terus berkembang searah dengan pertumbuhan dan kebutuhan pendidikan baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang

Kelemahan dan Kekuatan Internal Dinas Pendidikan

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Paser Tahun 2010-2014, untuk mengidentifikasi masalah Dinas Pendidikan menggunakan Metode Analisis Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities), and Tantangan (Threats) (SWOT). Metode Analisis SWOT memerlukan adanya masukan berupa Faktor Lingkungan Internal dan Faktor Lingkungan Eksternal. Faktor-faktor ini bersifat subyektif, oleh sebab itu penentuannya harus didasarkan analisis yang tidak memihak dan atas dasar kesepakatan bersama dari anggota kelompok analisis.

Faktor lingkungan internal terdiri dari faktor kekuatan dan faktor kelemahan, sebagai berikut:

- a. Kekuatan (Strengths)
 1. Tingginya kesadaran pendidik dan tenaga pendidikan untuk meningkatkan kompetensi.
 2. Adanya konsistensi dan kesinambungan upaya meningkatkan penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun .
 3. Tersedianya anggaran 20 persen dari APBD untuk pembiayaan pendidikan.

4. Tersedianya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mencetak lulusan yang memiliki keterampilan dan siap memasuki pangsa kerja.
 5. Tersedianya jaringan teknologi komunikasi dan informasi untuk pengembangan model pendidikan masa depan.
- b. Kelemahan (Weakness)
1. Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan SMA
 2. APK SMP belum mencapai 100 persen yang mengakibatkan belum tuntasnya wajib belajar 9 tahun
 3. Belum terpenuhinya kualifikasi tenaga pendidik.
 4. Kurang meratanya penyaluran tenaga pendidik di lembaga-lembaga sekolah baik kuantitas maupun bidang keahliannya.
 5. Belum setiap tenaga pendidik (tutor) Pendidikan Non Formal memiliki kemampuan yang memadai.
 6. Belum tersedianya database pendidikan yang komprehensif
 7. Belum optimalnya kerjasama antara Dinas Pendidikan dengan dunia usaha dan industri dalam penyerapan tenaga kerja lulusan sekolah kejuruan.
 8. Belum meratanya akses internet bagi semua jenjang pendidikan.
 9. Belum optimalnya sistem pembinaan karir pendidik dan tenaga kependidikan.
 10. Belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan

Penutup

Dinas Pendidikan telah menunjukkan perannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri I Tanah Grogot. Hal tersebut terlihat melalui program – program kegiatan yang telah dilaksanakan seperti peningkatan kualitas tenaga kependidikan yang meliputi pelatihan, penyediaan dana BOSDA, kemudian penyediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan serta penetapan dan pengembangan kurikulum.

Kegiatan peningkatan kualitas pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri I tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung yaitu tingginya kesadaran pendidik dan tenaga kependidikan, adanya konsistensi dan kesinambungan upaya meningkatkan penuntasan wajar diknas, tersedianya anggaran 20 persen dari APBD untuk pembiayaan pendidikan. Sedangkan faktor penghambat dalam melaksanakan perannya yaitu belum terpenuhinya kualifikasi tenaga pendidik, belum setiap tenaga pendidik non formal memiliki kemampuan yang memadai.

Salah satu faktor pendukung adalah dana namun dalam kondisi tertentu faktor ini bisa saja menjadi faktor penghambat. Untuk itu perlu dialokasikan dana tak terduga agar saat terjadi hambatan teknis dan memerlukan dana diluar alokasi yang telah ditentukan akan dapat teratasi sehingga program dapat berjalan dengan lancar.

Perlu disiapkan dan dilakukan seleksi yang matang bagi tenaga pendidik baik tenaga pendidik formal maupun tenaga pendidik non formal.

Peningkatan kualitas tenaga pendidik yang belum memenuhi standar (S1) dapat dilakukan melalui Universitas Terbuka.

Daftar Pustaka

- Hasbullah, 2006. *Dasar – dasar ilmu pendidikan umum dan agama islam*, PT. Raja Grafindo persada. Jakarta
- Mulyasa, E, 2009. *Menjadi kepala sekolah professional*, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Daryanto, M, 2005. *Administrasi pendidikan*, PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Hasbullah, 2006. *Otonomi pendidikan*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Hamalik, Oemar, 2009. *Dasar – dasar pengembangan kurikulum*, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Mulyasa, E. 2004. *Implementasi kurikulum*, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Sanjaya, Wina, H, 2010. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, PT. Prenada Media Group. Jakarta
- Imron, Ali, 1995. *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia*, Bumi Aksara. Jakarta
- Danim, Sudarwan, 2010. *Pengantar kependidikan*, Alfabeta. Bandung
- Danim, Sudarwan, 2011. *Pengantar kependidikan (edisi 2)*, Alfabeta. Bandung
- Moleong, Lexi J, 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Miles, Matthew. B dan A. Michael Hiberman, 2007. *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia. Jakarta
- Hasibuan, 2002. *Manajemen SDM*, Bumi Aksara. Jakarta
- Gibson, Ivancevich Donnelly, 2007. *Organisasi*, Bina Rupa Aksara. Jakarta

Sumber Internet

- _____. *Sekolah*, (<http://www.id.wikipedia.com> diakses 12 februari 2012)